



Rencana Strategis | 2013-2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol dan Linmas) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah selesai disusun.

Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah, yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas ini telah menyesuaikan perubahan strategis organisasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan harapan *stakeholders*. Dalam penyusunan, Badan Kesbang Pol dan Linmas mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang terjadi di masyarakat.

Penyusunan renstra ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, yaitu ***“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari : Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”***, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Jawa Tengah, khususnya misi ke-1, ***Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno—Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan***, misi ke-4, ***Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan***, dan misi ke-5, ***Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hidup orang banyak***.

Dengan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Kondusif, Demokratis dan Partisipatif”***, Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Tahun 2013-2018 memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Di dalamnya tergambar visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, dan indikator pencapaian dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, penyusunan Renstra ini juga mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis Badan Kesbang Pol dan Linmas yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di bidang kesatuan

bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Renstra ini merupakan wujud komitmen Badan Kesbang Pol dan Linmas dalam pembangunan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.

Demikian Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kesbang Pol dan Linmas dalam upaya mewujudkan visinya.

Semarang, 14 Mei 2014

Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas
Provinsi Jawa Tengah

Drs. Achmad Rofai, M.Si

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Landasan Hukum	
C. Maksud dan Tujuan	
D. Sistematika Penulisan	
BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jateng	7
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesbang Pol dan Linmas	
B. Sumberdaya Badan Kesbang Pol dan Linmas	
C. Kinerja Pelayanan Badan Kesbang Pol dan Linmas	
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbang Pol dan Linmas	
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	31
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesbang Pol dan Linmas	
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	
C. Telaahan Renstra R/L dan Renstra Provinsi	
D. Telaahan RTRW dan KLHS	
E. Penentuan Isu-isu Strategis	
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	42
A. Visi Badan Kesbang Pol dan Linmas	
B. Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas	
C. Tujuan dan Sasaran	
D. Strategi dan Arah Kebijakan	
BAB V Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	55
A. Program dan Kegiatan	
B. Indikator dan Pendanaan Indikatif	
BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Jawa Tengah 2013-2018	60
BAB VII PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang –selanjutnya disingkat Badan Kesbang Pol dan Linmas– sebagai institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat perlu disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) untuk merencanakan pembangunan lima tahun ke depan (2013-2018). Penyusunan Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi Gubernur Jawa Tengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, yaitu : **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari : Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah, terutama misi ke 1, yaitu : **Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno—Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan**; misi ke-4, yaitu : **Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan**; dan misi ke-5, yaitu : **Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hidup orang banyak**.

Di samping itu, agar penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas selain mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010-2014.

B. LANDASAN HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah.
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah Menjabarkan visi dan misi Gubernur, yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, yaitu : *“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari : Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”* ke dalam visi dan misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013-2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan visi dan misi kepala daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
2. Mewujudkan visi dan misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013-2018.
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra), landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

Bab II TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesbang Pol dan Linmas.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesbang Pol dan Linmas, telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra K/L serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan visi Badan Kesbang Pol dan Linmas dan misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Kemudian tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai, serta strategi kebijakan Badan Kesbang Pol dan Linmas dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 5 (lima) tahun dan tahunan. Indikator kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur. Indikator kinerja berupa angka, persentase (%) dan penjelasan naratif.

Bab VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Jawa Tengah, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol dan Linmas) merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbang Pol dan Linmas menyelenggarakan fungsi :

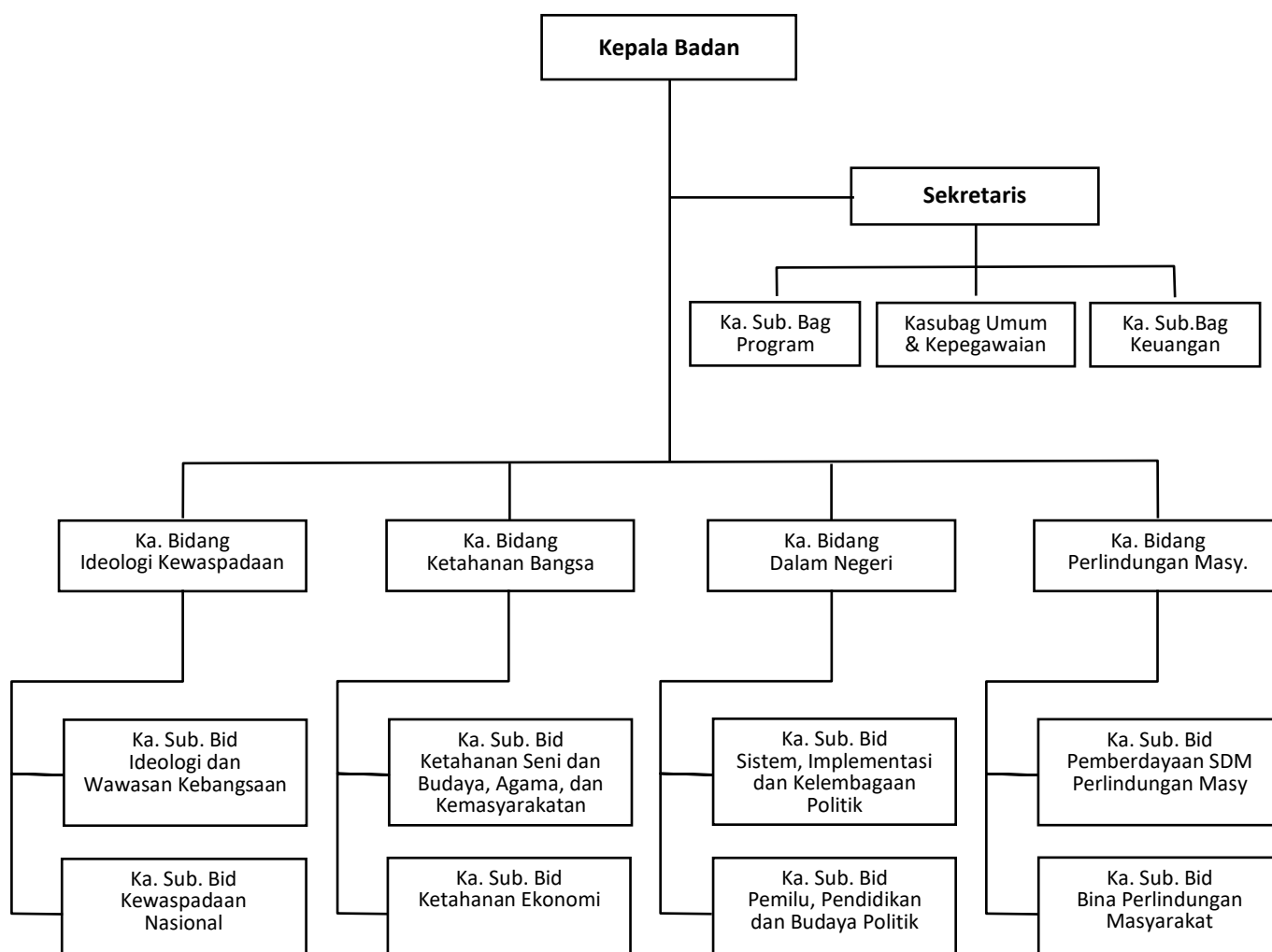
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbang Pol dan Linmas menurut Perda Nomor 7 Tahun 2008 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi;
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
 2. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun uraian tugas pokok sekretariat, masing-masing bidang, dan sub bidang adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat**

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum, dan kepegawaian.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program.
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Sub bagian Program

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.

2. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan.

2. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan membawahkan :

1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah bangsa dan penghargaan kebangsaan.

2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.

3. Bidang Ketahanan Bangsa

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama, kemasyarakatan, dan ketahanan ekonomi.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Bangsa membawahkan :

1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan seni dan

budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik, pemilu, pendidikan dan budaya politik.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemilu, pendidikan dan budaya politik.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan :

1) Sub Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik, meliputi : pelaksanaan kapasitas aparatur Kesbangpolinmas di bidang sistem, implementasi, kelembagaan politik dan pemerintahan, serta kelembagaan partai politik.

2) Sub Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemilu, pendidikan dan budaya politik, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpolinmas di bidang sistem dan implementasi pemilu, pilpres, pemilukada, pendidikan dan budaya politik.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Tugas:

Melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat dan bina perlindungan masyarakat.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan bina perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :

- 1) Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpolinmas di bidang pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.

- 2) Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina perlindungan masyarakat, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpolinmas di bidang bina sumber daya manusia perlindungan masyarakat.

B. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah dan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sampai bulan Februari 2014 sebanyak 107 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 105 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 2 orang tenaga kontrak. Dari 107 orang pegawai tersebut, sebanyak 60 orang laki-laki dan 47 orang perempuan.

Tabel 2.1

Pegawai Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jateng
Menurut Struktur dan Bidang

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Badan	1
Sekretariat	1
1. Sub Bagian Program	8
2. Sub Bagian Keuangan	11
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	24
Bidang Ideologi dan Kewaspadaan	1
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	8
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.	8

Bidang Ketahanan Bangsa	1
1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	9
2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi	6
Bidang Politik Dalam Negeri	1
1. Sub Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik	5
2. Sub Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik	6
Bidang Perlindungan Masyarakat	1
1. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat	8
2. Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat	6
Jabatan Fungsional	-

b. Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 105 orang PNS yang bekerja di Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan sejumlah 105 orang PNS terdiri dari : 13 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 47 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 4 orang berpendidikan Diploma 3, 36 orang berpendidikan SLTA, 3 orang berpendidikan SLTP dan 2 orang berpendidikan SD.

Tabel 2.2

Pegawai Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jateng
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strate 2	13
Strata 1	47
Diploma 3	4
SLTA	36
SLTP	3
SD	2
Total	105

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 105 orang PNS, terdiri dari Golongan II 20 orang; Golongan III 77 orang; Golongan IV 9 orang.

Tabel . 2.3

Pegawai Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jateng
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	10	III/a	16	IV/a	4
II/b	3	III/b	29	IV/b	4
II/c	4	III/c	9	IV/c	1

II/d	3	III/d	22	IV/d	-
	20		76		9

Tabel .2.4
Pegawai Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jateng Menurut Golongan

Diklat PIM	Jumlah	Jabatan Eselon	Jumlah
TK II	6	Eselon II	1
TK III	5	Eselon III	5
TK IV	18	Eselon IV	11
TOTAL	29	-	17

2. Asset/Modal SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

1. Tanah seluas 3.314 m².
2. Gedung dan Bangunan 3,108 m².
3. Alat kantor dan rumah tangga terdiri dari :
 - a. Komputer : 33 buah
 - b. Printer : 30 buah.
 - c. Mesik Ketik : 17 buah.
 - d. Laptop : 12 buah.
4. Alat Transportasi :
 - a. Kendaraan Roda Empat : 12 buah
 - b. Kendaraan Roda Dua : 8 buah

C. Kinerja Pelayanan SKPD

1. Kondusivitas Wilayah

Secara umum situasi daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008-2012 aman dan tertib. Meskipun kondusif bagi pembangunan masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain aksi terorisme, kerusuhan sebanyak 72 kasus, konflik sosial sebanyak 1.430 kasus, unjuk rasa

sebanyak 2.523 kejadian, serta masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat,

Tabel 2.5
Unjuk Rasa Menurut Kelompok di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

No	Kelompok Massa	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pelajar	4	45	9	0	0
2	Mahasiswa	135	101	123	80	167
3	Buruh	52	70	51	72	73
4	Masyarakat	245	151	197	174	251
	Jumlah	436	367	380	326	491

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tabel 2.6
Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

No	Tuntutan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Ideologi	0	2	3	2	0
2	Politik	59	44	72	31	4
3	Ekonomi	75	122	93	103	73
4	Sosbud	266	93	118	137	378
5	Hukam	36	106	94	53	37
	Jumlah	436	367	380	326	491

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tabel 2.7
Frekuensi Kerusakan yang Membawa Korban di Jawa Tengah

No	Keterangan	Tahun					Agust 2013
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Meninggal	3	2	2	3	1	4
2	Luka-luka	73	8	23	34	27	50
3	Material						
	a.Rumah/Perabot	30	7	14	4	0	30
	b.Mobil/motor	11	11	4	17	11/3	5/8
4	Jumlah Kejadian	20	12	13	11	29	27

Sumber : Diolah dari data Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jateng

Di samping itu, tingkat kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak pidana (*crime total*) sebanyak 92.902 kasus dan tindak pidana menonjol (*crime index*) yang terdiri dari curat, curas, curanmor, pembakaran, penganiayaan, pembunuhan, uang palsu, narkoba, kenakalan remaja dan pemerkosaan sebanyak 43.128 kasus.

Tabel. 2.8

Jumlah Tindak Pidana dan Tindak Pidana Yang Menonjol di Provinsi Jawa Tengah 2008-2012

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Tindak Pidana Yang Menonjol	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	2008	17.008	12.945	7.738	5.357
2	2009	17.391	12.850	7.857	5.246
3	2010	19.645	12.700	8.948	6.117
4	2011	19.764	10.708	8.971	5.186
5	2012	19.094	12.039	9.614	4.926
	Jumlah	92.902	61.242	43.128	26.832

Sumber : Polda Jateng 2013 dan RPJMD Jateng 2013-2018

Sementara itu, sepanjang 2008-Agustus 2013, tercatat peningkatan jumlah orang asing di Jawa Tengah. Mayoritas dari mereka adalah tamu serta tenaga kerja asing. Kemudian jumlah Ormas dan LSM yang terdata sampai dengan bulan Agustus 2013 mencapai 352 lembaga.

Tabel 2.9

Jumlah Orang Asing Pendatang di Provinsi Jawa Tengah

No	Keterangan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	Agust 2013
1	Tamu Asing	4.568	4.495	5.847	10.017	14.747	12.690
2	Tenaga Kerja Asing	1.706	1.834	1.991	1.057	1.676	1.923
3	Riset Asing	15	16	33	36	17	7
4	Corp Diplomatik	39	56	100	215	89	82
5	Wartawan Asing	8	-	-	2	-	2
6	Shooting Film/tv Asing	-	1	-	-	-	-
7	Atlit Asing	6	80	80	22	16	16
8	Artis Asing	12	2	31	31	25	6
	Jumlah	6.354	6.483	8.084	11.360	16.570	14.726

Sumber : Diolah dari data Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jateng

2. Kondisi Politik Daerah

Kondisi politik di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilu memiliki kecenderungan yang serupa di tingkat nasional, yang terus menurun.

Tingkat persentase pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 sebesar 58,46%, turun menjadi 55,73% pada Tahun 2013. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kab/Kota selama kurun waktu Tahun 2008-2012, dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi Kota Salatiga 82,06% dan terendah Kabupaten Pemasang 56,74%. Adapun partisipasi pada pemilu DPR/DPRD dan Pilpres tahun 2009 mencapai sebesar 71,26% dan 71,01%. Pada tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 sebesar 55,73%. Sedangkan pada Pilkada Kudus, Temanggung, dan Banyumas masing-masing sebesar 79,30%; 92,64%; dan 66,30%. Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 2.10
Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

No	Kegiatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat	1	35	6	9	6
2	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol	-	10	3	4	4
3	Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat	1	6	4	4	4
	Jumlah	2	51	13	17	14

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

3. Perkembangan Demokrasi

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat diketahui dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan kelembagaan demokrasi (*democratic institution*) yang diuraikan menjadi 11 variabel dan 28 indikator. Skor IDI Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 66,45 lebih tinggi dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 63,42. Sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 65,59. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2012

No	Aspek/Variable	Tahun (Skor)		
		2009	2010	2011
I	Kebebasan Sipil	86,48	84,83	84,05
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	78,75	55,00	51,88
	2. Kebebasan Berpendapat	50,02	0,00	74,97
	3. Kebebasan Berkeyakinan	93,22	93,22	86,44
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	86,93	100,00	93,05
II	Hak-Hak Politik	51,85	46,29	46,29
	1. Hak Memilih dan dipilih	42,59	42,59	42,59
	2. Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	61,11	50,00	50,00
III	Lembaga Demokrasi	64,43	63,70	73,04
	1. Pemilu Yang Bebas dan Adil	94,94	94,94	94,94
	2. Peran DPRD	69,88	42,60	69,48
	3. Peran Partai Politik	5,01	57,35	98,06
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80,30	80,30	80,30
	5. Peran Peradilan Yang Independen	75,00	50,00	32,50
	Skor IDI	66,45	63,42	65,59

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

4.Pembinaan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

Dalam rangka pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

selama kurun waktu 2008-2012 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

No	Kegiatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sarasehan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya	6	6	4	4	4
2	Sarasehan Pendayagunaan Ormas	-	4	2	2	2
3	Sarasehan Pengkajian Pemeliharaan dan Pengembangan Kesenian serta Budaya Daerah	-	-	2	2	2
4	Peningkatan Peran Politik Ormas/LSM/Toma/Toga	5	3	3	4	4
	Jumlah	11	13	11	12	13

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun periode Renstra SKPD Tahun 2008-2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 33.648.045.000,00 yang diarahkan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yaitu : pelaksanaan koordinasi bidang kesbangpolinmas; KOMINDA;

pengawasan terhadap orang asing; koordinasi pengamanan wilayah; pembinaan sosial politik serta pengkajian dan pemantauan dampak perekonomian terhadap kondusivitas wilayah; fasilitasi pembinaan ketentraman masyarakat; monitoring dan pendataan daerah rawan konflik gangguan keamanan dan ketertiban; simulasi penanganan huru-hara dan unjuk rasa serta dialog pengelolaan pendapat umum terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil yang dicapai adalah:

- a. Tertanganinya 72 kasus kerawanan sosial politik.
- b. Tersedianya data/informasi daerah untuk antisipasi potensi kerawanan konflik di 35 kabupaten/kota.
- c. Meningkatnya kemampuan 630 petugas pengamanan obyek vital (Pam Obvit) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi penjagaan dan pengamanan aset-aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Terlaksananya koordinasi pengawaman wilayah dengan kabupaten/kota dan aparat keamanan.
- e. Terselenggaranya 18 kali Rakor PAM wilayah kabupaten/kota bagi 1.215 orang aparatur keamanan.
- f. Terselenggaranya dialog pengelolaan pendapat umum terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- g. Diperolehnya peta daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

2. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.322.783.000,00 yang diarahkan untuk kegiatan menjaga terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: rakor Satpol PP kabupaten/kota; peningkatan koordinasi penyelenggaraan kerjasama ketentraman dan ketertiban di daerah perbatasan; pengendalian dan penanganan

ketentraman masyarakat; pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah; pengendalian unjukrasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah; sinkronisasi dan evaluasi program Satpol PP; sarasehan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai antara lain:

- a. Pengendalian dan penanganan keamanan dan ketertiban umum di 35 kabupaten/kota.
- b. Teridentifikasinya permasalahan dan potensi konflik di daerah perbatasan.
- c. Terbangunnya sinergitas dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Terlaksananya pengamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa yang tertib dan aman.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.896.066.000,00 yang diarahkan untuk program meningkatkan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang dilaksanakan dengan kegiatan, antara lain : peningkatan kesadaran bela negara; peningkatan pemahaman ideologi negara, pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya serta fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan pendidik.

Hasil yang dicapai antara lain :

- a. Adanya peningkatan kesadaran bela negara bagi 1.560 orang.
- b. Pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya sebanyak 1.545 orang.
- c. Deklarasi gerakan perwujudan Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila.

4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.004.531.000,00 diarahkan untuk memperkuat pengembangan wawasan kebangsaan melalui pemberdayaan potensi

ormas, pemeliharaan hubungan etnisitas dengan negara untuk mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: peningkatan apresiasi nilai-nilai kebangsaan melalui pagelaran seni dan budaya daerah; pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan; pemeliharaan hubungan etnisitas dengan negara; penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat serta etika, budaya politik dalam kerangka penguatan wasbang dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar.

Hasil yang dicapai adalah :

- a. Terselenggaranya fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 55 kali.
- b. Meingkatnya kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial bagi 355 orang.
- c. Terlaksananya Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi (Forkumkon) penanganan ketentraman ketertiban umum sebanyak 6 kali.

5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 701.416.000,00 yang diarahkan untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan Napsa, miras dan penyakit masyarakat lainnya dengan melalui kegiatan : pelaksanaan operasional penegakan hukum bidang P4GN di kabupaten/kota; Pembentukan dan Fasilitasi Satgas Penegakan Hukum Bidang P4GN; Penyelenggaraan Rakor Penegakan Hukum Bidang P4GN BK dan stakeholders terkait serta penyusunan prosedur tetap penanganan kasus narkoba di Jawa Tengah.

Hasil yang dicapai adalah :

- a. Terselenggaranya kegiatan operasi mendadak 1 kali dan operasi penyelidikan 30 kabupaten/kota.
- b. Terselenggaranya satgas penegakan hukum bidang P4GN.
- c. Terselenggaranya Rakor penegakan Hukum bidang P4GN BNH dan stakeholders terkait

- d. Terselenggaranya Rakor penyusunan prosedur tetap penanganan Kasus Narkoba.

6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 28.119.758.000,00 diarahkan untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan penguatan peran Ormas/LSM dan tomas/toga; penguatan potensi politik masyarakat; pendidikan politik bagi elemen masyarakat; Pemantauan dan pendataan parpol di daerah serta penguatan sistem dan implementasi pemilukada.

Hasil yang dicapai adalah :

- a. Terselenggaranya peningkatan dan penguatan peran politik bagi 1.185 orang.
- b. Pendidikan politik bagi elemen masyarakat 2.045 orang.

7. Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (Ratih).

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.317.916.000 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perlindungan masyarakat dan rakyat terlatih yang dilaksanakan melalui kegiatan : Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se-Jawa Tengah; Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se-Jawa Tengah; Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan di air serta Fasilitasi Kegiatan Menwa Mahadipa.

Hasil capaian program adalah :

- a. Terselenggaranya pembinaan dan pengerahan Hansi/Linmas kabupaten/kota se-Jawa Tengah bagi 3.995 orang.
- b. Terselenggaranya pelatihan ketrampilan pengamanan lingkungan bagi komandan satlinmas bai 310 orang.

Tabel 2.13

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi
----	-------------------	--------	--------	-----------

**Rencana Strategis
Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018**

	Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	RPJMD 2008-2013		2008	2009	2010	2011	2012	Agst 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan								
1	Menurunnya gangguan keamanan	Menurun	kali	20	12	12	11	16	27
2	Fasilitasi pembinaan tranmas	Meningkat	orang	140	140	140	140	70	140
B	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal								
1	Menurunnya Tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di masyarakat	Menurun	kali	20	12	12	11	16	27
2	Terlaksananya pengendalian dan penanganan trantibbum di Jawa Tengah	Meningkat	Kab/kota	35	35	35	35	35	35
C	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Meningkat	Kab/Kota	35	35	35	35	35	35
2	Peningkatan bela negara	Meningkat	Kali/orang	4/490	3/380	6/300	3/180	3/210	6/400
3	Pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya	Meningkat	Keg/orang	6/400	6/385	4/280	4/280	24/1.545	24/1.545
D	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
1	Bertambahnya jumlah kemitraan dengan LSM dan masyarakat	Meningkat	Keg/Orang	0	4/360	6/400	8/450	8/450	9/550
2	Kegiatan Pendayagunaan potensi ormas	Meningkat	Keg/orang	0	4/280	2/140	2/120	3/180	4/360
3	Terselenggaranya kegiatan penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat	Meningkat	Keg/orang	0	0	3/150	2/100	3/225	4/360
4	Terselenggaranya kegiatan peningkatan etika, budaya politik dalam rangka penguatan wasbang dan ideologi negara bagi pemuda dna pelajar	Meningkat	Keg/orang	7/505	6/400	4/240	4/480	25/2045	25/2045
E	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan								
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	meningkat	Jumlah Anggota Linmas	186.304	272.280	272.280	272.280	272.280	272.280
2	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pemberdayaan FKDM	Meningkat	Kali	0	0	35	6	12	58
3	Peningkatan Kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial	Meningkat	Kali/orang	0	0	3/150	2/100	2/105	7/355
F	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat								
1	Menurunnya tingkat penyalahgunaan Napza, miras dan pekat lainnya.	Menurun							
2	Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama penegakan hukum, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Meningkat	Paket	1	1	1	1	1	5
G	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat								
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pilukada	Meningkat	% Pemilih Pilkada Gub	58,46	-	-	-	-	55,73
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Peningkatan dan penguatan Peran Politik Toma/Toga Ormas/LSM	Meningkat	Kali/orang	5/375	0	3/210	4/300	4/300	17/1.260
3	Terselenggaranya penddikan politik bagi elemen Masyarakat	Meningkat	Kali/orang	1/180	0	6/600	9/765	6/600	25/ 2.345
H	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (RATIH)								
1	Meningkatnya partisipasi linmas dan Ratih	Meningkat	Jumlah Anggota Linmas	186.304	272.280	272.280	272.280	272.280	272.280
2	Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengerahan Hansip/linmas Jab/Kota se- Jawa Tengah	Meningkat	Kali/orang	0	4/ 1.370	2/875	1/875	9/3995	
3	Peningkatan Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas	Meningkat	Kali/orang	0	1/60	1/50	2/100	2/100	6/310

Tabel 2.14
Realisasi Pendanaan Menurut Program SKPD
Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target RPJMD 2008-2013
(1)	(2)	(3)
A	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	33.648.045.000
B	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3.322.783.000
C	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	9.896.066.000
D	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3.004.531.000
E	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	22.005.705.000
F	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	701.416.000
G	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	28.119.758.000
H	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (RATIH)	11.317.916.000

Tabel 2.15
Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

No	Uraian	Realisasi /Tahun/Rp				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Belanja Tidak Langsung	5.076.213.000	6.638.409	7.432.254.000	7.015.253.000	7.340.915.000
2	Belanja Langsung	31.106.222.000	25.881.201.000	20.074.694.000	15.118.895.000	24.789.426.000
	TOTAL	36.182.435.000	25887839409	27506948000	22134148000	32130341000

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesbang Pol dan Linmas dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang belum sepenuhnya optimal.

3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesbang Pol dan Linmas yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesbang Pol dan Linmas di kabupaten/kota.
5. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesbang Pol dan Linmas menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan antar Provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.

5. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
6. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah, seperti daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
7. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
8. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum.
9. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undnag politik, wacana penyelenggaraan sistem pilukada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD.
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.

- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi kepala daerah Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Jawa Tengah 2013-2018 yaitu :”*Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari : Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*, khususnya misi ke-1, ke-4, dan ke-5, dengan pembangunan di bidang kesbangpol dan linmas.
- d. Adanya peluang dukungan dana dari APBD, APBN serta lembaga donor lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah.
- e. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas, OKP dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat.
 - b. Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara di masyarakat.
 - c. Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
 - d. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam.
 - e. Masih maraknya aksi-aksi unjukrasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.
 - f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
 - a. Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.
 - b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.

- c. Masih adanya organisasi atau kelompok keagamaan yang menggunakan cara-cara dakwah yang menjelekkkan dan menyerang kelompok lain yang berpotensi memicu terjadinya konflik SARA di masyarakat.
 - d. Masih muncul dan berkembangnya paham keagamaan atau aliran sesat yang meresahkan masyarakat.
 - e. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
 - f. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
 - g. Masih tingginya angka kemiskinan yang bisa berpengaruh terhadap munculnya kesenjangan sosial, yang memicu konflik sosial ekonomi di masyarakat.
 - h. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi dampak krisis global yang berimbas pada berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.
 - i. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
 - j. Terjadinya dekadensi moral di masyarakat yang ditandai dengan banyaknya penyakit masyarakat, seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan miras.
 - k. Masih terdapat konflik perebutan dala pengelolaan sumber daya alam (termasuk pesisir) di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri.
3. Bidang Politik Dalam Negeri :
- a. Tingginya angka ketidakhadiran atau absensi (golput) dalam setiap kegiatan pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilukada

- akibat kejenuhan, apatisme masyarakat dan rendahnya kesadaran berpolitik masyarakat.
- b. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan publik.
 - c. Tingginya praktek politik uang (*money politics*) setiap pelaksanaan kegiatan pemilu.
 - d. Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis di masyarakat.
 - e. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten/kota, baik antar pendukung maupun antar pasangan calon.
 - f. Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di masyarakat.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat :
- a. Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
 - b. Masih belum optimalnya kapasitas dan ketrampilan satuan perlindungan masyarakat dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya di masyarakat.
 - c. Berkurangnya etos kerja satuan perlindungan masyarakat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masyarakat akibat masih minimnya tingkat kesejahteraan.

B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2013-2018) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: *Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*”**.

Dari visi dan misi tersebut maka ada kesesuaian antara visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD dengan visi dan misi Badan

Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif”**, khususnya indikator penjabaran visi Sejahtera, yaitu kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, saling bantu membantu, saling pengertian dan *tepo sliro*.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan 7 (tujuh) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno -- Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “*Mboten Korupsi dan Mboten Ngapusi*”;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sedangkan dari penjabaran dari misi, yang sesuai dengan bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat adalah misi yang ke-1 yaitu: **Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno -- Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan**, misi ke-4, yaitu: **Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan**; serta misi ke-5, yaitu: **Memperkuat Partisipasi**

Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut hidup orang Banyak.

Sedangkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Jawa Tengah 2013-2018 tersebut, yang sesuai dengan pembangunan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat adalah :

1. Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi ke-1 yaitu: Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.

Tujuannya: Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Trisakti Bung Karno. S

Sasarannya: Mengarahkan seluruh sasaran pembangunan menuju Kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

2. Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi ke-4 yaitu: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.

Tujuannya:

- a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
- b. Memperkuat 4 (empat) pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
- d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

Sasaran :

- a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;

- b. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa;
- c. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;
- d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
- e. Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi;
- f. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
- g. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran nilai-nilai budaya Jawa;
- h. Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.

3. **Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi ke-5**, yaitu:

Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.

Dengan tujuan yang sesuai yaitu tujuan huruf a, yaitu: Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; dan sasaran huruf a, yaitu: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

C. Telaah Renstra Kemendagri Tahun 2010-2014

Visi Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2010-2014 adalah: ***Terwujudnya sistem politik demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta kebudayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumberdaya aparatur yang profesional dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.***

Dari visi dan misi Kementrian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesbangpolinmas dalam lima tahun ke depan ada beberapa kesesuaian dan

merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: visi terbentuknya sistem politik demokratis, dan kebudayaan masyarakat yang partisipatif.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Renstra Kemendagri tahun 2010-2014 tersebut adalah :

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat dan daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Dari misi renstra Kemendagri tersebut yang sesuai dengan bidang pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat adalah misi ke-1 yaitu: Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.

Sedangkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi dalam Renstra Kemendagri tahun 2010-2014 yang sesuai adalah **tujuan nomor 1, yaitu: Memperkokoh Kesatuan dan Persatuan Nasional serta Stabilitas Politik Dalam Negeri yang Dilandasi oleh Semangat dan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui Pengembangan Sistem Politik yang Demokratis dan Berkedaulatan Rakyat;** dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden);

2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan; dan
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah terwujudnya ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang;
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Dari kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah tersebut, ada kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi program pembangunan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat, yaitu kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; yaitu strategi :

- 1) Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
- 2) Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan ini sesuai dengan misi ke-4 dalam renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, yaitu: Mewujudkan Stabilitas Masyarakat yang Kondusif untuk Mendukung Terciptanya Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Tengah.

Selain itu, misi ke-4 tersebut juga sesuai dan relevan guna mengantisipasi beberapa persoalan yang muncul di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan sebagai dampak dari kebijakan dan pengembangan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- a. Potensi konflik sosial akibat dampak pengalihan dan penggunaan lahan yang akan digunakan sebagai lahan pengembangan kawasan strategis.
- b. Potensi konflik perebutan sumber daya alam akibat dampak pengembangan kawasan pertambangan atau perindustrian.
- c. Potensi konflik perbatasan atau antar wilayah atau daerah sebagai dampak pengembangan wilayah perbatasan.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- a. Meningkatnya kerusakan ekosistem teresterial, pesisir dan laut, yang ditandai dengan masih tingginya luas lahan kritis;
- b. Rusaknya *catchment area* yang disebabkan oleh terjadinya deforestasi dan degradasi hutan;
- c. Meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut baik mangrove maupun terumbu karang;
- d. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan akibat kerusakan ekosistem yang cukup tinggi;
- e. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- f. Meningkatnya pencemaran lingkungan.

Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut, dalam rangka mengantisipasi dampak dari kerusakan lingkungan dan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran kelembagaan terhadap pelestarian kerusakan lingkungan hidup, dalam renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 telah memuat misi ke-2, yaitu: Mewujudkan Kewaspadaan Nasional dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Peran Kelembagaan Masyarakat.

F. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, telaah visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Kemendagri tahun 2010-2014 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Provinsi Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Merosotnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini dan masih belum optimalnya kinerja anggota Linmas dalam rangka mendeteksi dan mencegah dini potensi bencana sosial dan bencana alam di masyarakat.

5. Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI

Visi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah:

**“Terwujudnya kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang kondusif,
demokratis dan partisipatif”.**

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Tujuan : Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Sasaran :

- a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia..

2. **Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.**

Tujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional.
- b. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional.
 - b. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional.
3. **Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.**

Tujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis
- b. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan etika politik yang demokratis.
 - b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik.
4. **Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.**

Tujuan : Meningkatkan stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat..

Sasaran :Meningkatnya stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat.

5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan peran lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, demokratis dan partisipatif.

Sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia satuan LINMAS/RATIH dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat.
- c. Meningkatkan sinergisitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan indikator Target dalam Pencapaian Visi Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Jawa Tengah Yang Kondusif, Demokratis dan Partisipatif	Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.	a. Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap 4 pilar kebangsaan. b. Persentase jumlah kegiatan pendidikan politik ideologi politik dan wasbang c. Persentase jumlah peserta atau masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik ideologi politik dan wawasan kebangsaan. d. Berkurangnya jumlah organisasi massa atau kelompok masyarakat di Jawa Tengah yang bertujuan ingin mengganti ideologi Pancasila
			b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Berkurangnya jumlah konflik sosial di masyarakat. b. Meningkatnya pembauran antar etnis di Indonesia
Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional.	a. Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial. b. Persentase Jumlah peserta atau masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kewaspadaan nasional
			Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional.	a. Terbentuknya dan optimalnya KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah b. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, FPWK, di Jawa Tengah c. Jumlah peserta

				peningkatan kapasitas kelembagaan dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini.
	Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah b. Turunnya praktek money politics (politik uang) di masyarakat c. Persentase kegiatan penguatan etika dan budaya politik demokratis d. Persentase jumlah peserta kegiatan Peningkatan budaya dan etika politik e. Tersusunnya modul pendidikan politik etika dan budaya demokrasi f. Tersusunnya modul pendidikan politik 4 pilar kebangsaan
		Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.	Meningkatnya Prosentase partisipasi politik dalam pemilu dan pilukada
		Meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik	Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkurangnya angka konflik politik dalam pemilu dan pilukada b. Meningkatnya peran partai politik di daerah c. Terwujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang di masyarakat.
	Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.	Meningkatkan stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat..	Meningkatnya stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Turunnya angka penyakit masyarakat seperti : kriminalitas, NAPZA, miras b. berkurangnya angka konflik SARA, sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat c. Meningkatnya kecintaan dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa. d. Meningkatnya tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. e. Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan

				ekonomi masyarakat
	Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.	Meningkatkan peran lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, demokratis dan partisipatif.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Meningkatnya kapasitas SDM satuan LINMAS/RATIH dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintahan b. Terlaksananya SOP dan SPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. c. Rasio jumlah ratih/linmas dengan penduduk
			Meningkatnya sinergisitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.	Terjalinnnya dengan berbagai pihak atau <i>stakeholders</i> terkait pemecahan masalah-masalah strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- 1. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan misi ke-1 :** Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat melalui

seminar, pelatihan, bintek, penanaman ideologi Pancasila dan ToT Kader Wasbang.

- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI melalui penguatan kesadaran bela negara, pagelaran seni dan budaya daerah, penguatan forum-forum kemasyarakatan dan peningkatan pembauran kebangsaan.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. **Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan misi ke-2 :** Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional melalui penguatan kapasitas forum dan anggota FKDM dan KOMINDA, pelatihan dan optimalisasi peran anggota Linmas, seminar dan pelatihan sumber konflik dan penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok masyarakat lain.
- b. Peningkatan kapasitas kelembangaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional melalui rakorda forum kemasyarakatan serta bintek manajemen organisasi kemasyarakatan dan parpol

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan misi ke-3 : Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi :

Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum melalui pendidikan politik bagi masyarakat, generasi muda, pemilih pemula serta perempuan.

Arah Kebijakan :

Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi

4. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan misi ke-4 : Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Strategi :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah melalui optimalisasi dan peningkatan kapasitas anggota Linmas dan forum FKDM serta KOMINDA
- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah melalui forum rakor pengamanan wilayah, rakor peningkatan kerjasama daerah perbatasan serta peningkatan kemampuan manajemen konflik daerah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah

- 5. Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan misi ke-5 :** Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat melalui bintek, pelatihan dan seminar peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif melalui pembentukan forum-forum kemasyarakatan yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

Tabel 4.2.
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat. b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme. b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI	Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.
Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.	a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional. b. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional.	a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional. b. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional.	a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional. b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.	a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.

<p>Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.</p>	<p>a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik</p>	<p>a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis.</p> <p>b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.</p> <p>c. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik</p>	<p>Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.</p>	<p>Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi</p>
<p>Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.</p>	<p>Meningkatkan stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat..</p>	<p>Meningkatnya stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat.</p>	<p>a. Peningkatan peran lembaga masyarakat dalam mendorong partisipasi politik masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.</p>	<p>a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah</p>

<p>Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.</p>	<p>Meningkatkan peran lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, demokratis dan partisipatif.</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.</p> <p>b. Meningkatnya sinergisitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.</p>	<p>a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif</p>	<p>a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.</p> <p>b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.</p>
--	---	--	--	---

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program Dan Kegiatan

1. Program dan kegiatan untuk mewujudkan Misi ke-1:

Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatannya :

- a. Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan melalui pagelaran Seni dan Budaya Daerah.
- b. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat.
- c. Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara.
- e. Peningkatan Etika, Budaya Politik dalam Rangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara bagi Pemuda dan Pelajar.

2. Program dan kegiatan untuk mewujudkan Misi ke-2:

Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Kegiatannya :

- a. Kegiatan Fasilitasi FKDM (Amanat Permendagri No 12 Tahun 2006).
- b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial.
- c. Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat.
- d. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Fungsi FKUB serta FKUB Generasi Muda di Jawa Tengah.
- e. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Fungsi FPBI dan PERANTARA di Jawa Tengah
- f. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan FPWK di Jawa Tengah

- g. Rapat Koordinasi Daerah Forum Kemasyarakatan bidang kesbangpol di Jawa Tengah (Rakorda dan evaluasi FKUB,FKDM,FPBI,FPWK)

3. Program dan kegiatan untuk mewujudkan Misi ke-3:

Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.

Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatannya:

- a. Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga.
- b. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah.
- c. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol.
- d. Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat.
- e. Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat.
- f. Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilukada.
- g. Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat.
- h. Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilukada.
- i. Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah.
- j. Pendidikan Politik bagi Perempuan
- k. Peningkatan Komunikasi Politik bagi Masyarakat.
- l. FGD Penguatan IDI Provinsi Jawa Tengah
- m. Penyusunan Modul Pendidikan Politik Etika dan Budaya Demokrasi
- n. Penyusunan Modul Pendidikan Politik Penguatan 4 Pilar Kebangsaan
- o. Pemantauan dan Pendataan Ormas dan LSM di Jawa Tengah
- p. Workshop Manajemen Organisasi Partai Politik

4. Program dan kegiatan untuk mewujudkan Misi ke-4:

Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

4.1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatannya :

- a. Pelaksanaan Koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas.
- b. Kegiatan KOMINDA.
- c. Focus Group Discussion (FGD) Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan.
- d. Pengawasan Orang Asing.
- e. Koordinasi Pengamanan Wilayah.
- f. Koordinasi penciptaan kondusifitas daerah di Provinsi Jawa Tengah.
- g. Pembinaan Sosial Politik.

- h. Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian.
- i. Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah.
- j. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Keamanan.
- k. Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik.
- l. Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi.
- m. Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi Kesejahteraan Rakyat.
- n. Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan.
- o. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
- p. Penguatan Nilai-nilai Sejarah dan Kebangsaan.
- q. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal.
- r. Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Potensi Terorisme dan Radikalisme bagi Pemuda dan Pelajar.
- s. Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi.
- t. FGD Pengkajian Patologi Sosial.
- u. Dialog dan Sosialisasi P4GN.
- v. Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- w. Fasilitasi Kegiatan Penanganan Keamanan Dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Amanat Inpres No. 2 Th. 2013).
- x. Penyusunan Modul Manajemen Konflik Sosial di Masyarakat
- y. Penyusunan Peta Potensi Konflik dan Potensi Unggulan Daerah di Jawa Tengah

4.2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatannya :

- a. Peningkatan Kesadaran Bela Negara.
- b. Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara.
- c. Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring/Validasi Data Paham Lain.
- d. Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Wasbang.
- e. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah.
- f. Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan.
- g. Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya.

- h. Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan.
- i. Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik.
- j. Mediasi Penanganan Masalah Strategis yang Berdampak Politis.
- k. Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa.
- l. Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan.
- m. Fasilitasi Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- n. Penguatan Ideologi Pancasila bagi Perempuan.
- o. FGD Penguatan Karakter Generasi Muda.
- p. Kegiatan Pendidikan Kader Politik
- q. Kegiatan Pendidikan Kader Wasbang
- r. Jelajah Nusantara

5. Program dan kegiatan untuk mewujudkan Misi ke-5:

Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

5.1. Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih

Kegiatannya :

- a. Peningkatan Ketampilan Deteksi Dini bagi Anggota Satlinmas.
- b. Pembinaan dan Pengerahan HANSIP/LINMAS se-Jawa Tengah.
- c. Peningkatan Ketrampilan PAM Lingkungan bagi Komandan Satlinmas.
- d. Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan di Air.
- e. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas.
- f. Fasilitasi Kegiatan Menwa Mahadipa.
- g. Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa.
- h. Peningkatan Ketrampilan Satlinmas dan PAM Pemilu.
- i. Orientasi Kesiapan PAM Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 (evaluasi dan Persiapan Pileg dan Pilpres 2019).
- j. Peningkatan Ketrampilan PAM Saerah Rawan Kamtibmas.
- k. Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu.
- l. Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan.
- m. Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se-Jawa Tengah.

5.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatannya :

- a. Kegiatan sinkronisasi Kesbangpol dan linmas
- b. Monitoring dan Evaluasi

- c. Bimbingan Teknis Peningkatan Ketrampilan dan Penguasaan IT bagi aparatur pemerintah.
- d. Inisiasi Raperda Partisipasi publik di Jawa Tengah

B. Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

Terlampir

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD JAWA TENGAH 2013-2018

Indikator kinerja daerah (Tabel 6.1) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi ke- 1; Misi ke-4, dan Misi ke-5 dalam RPJMD Jawa Tengah: ***“Menuju Jawa Tengah Yang Sejahtera dan Berdikari : Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”***.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu pada Target RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kondusivitas daerah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah.	35	35	35	35	35	35	35	35
2	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan, ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.	35	35	35	35	35	35	35	35
3	Meningkatnya kapasitas aparatur Badan Kesbang Pol dan Linmas tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan	260	280	300	320	340	360	380	35
4	Tingkat konflik sosial yang terjadi	16	15	14	13	12	11	10	10
5	Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah	66,22	66,85	67,48	68,11	68,74	69,37	70,00	70,00
6	Persentase Pemilih Dalam Menggunakan Hak Pilih Melalui Pemilu (%)								
	- Pilpres dan Pileg			75					75
	- Pilkada Provinsi		58,46					75	75
	- Pilkada Kab/Kota		64,40	66,52	68,64	70,76	72,88	75	76
7	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Parlemen Provinsi (%)		21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
8	Rasio Kesiapsediaan Komponen Pendukung dan Cadangan dengan Jumlah Penduduk	0,0083	0,0084	0,0085	0,0086	0,0087	0,0088	0,0089	0,0089
9	Menurunnya angka kriminalitas	19.094	19.000	18.992	18.822	18.715	18.615	18.500	18.500

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih.

